

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah daerah untuk mendukung program-program nasional guna mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan serta keperluan masyarakat daerah, salah satunya ialah Program Strategis Nasional (PSN). Berkenaan dengan hal tersebut, *government public relations* (GPR) berperan dalam menyelaraskan kebijakan lintas tingkatan agar didukung oleh masyarakat daerah seiring dengan adanya keterbatasan pemerintah pusat pula dalam melaksanakan tugas pemerintahan secara menyeluruh. Meskipun demikian, implementasi salah satu kebijakan Program Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Banyumas justru menempatkan Pemerintah Kabupaten Banyumas pada kendala komunikasi kebijakan lintas tingkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik *government public relations* (GPR) dalam mendukung kebijakan PSN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian studi kasus (*case study*). Pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui teknik wawancara semi terstruktur (*in-depth semi-structured interview*), observasi, dan dokumentasi pada lima informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) praktik GPR Pemkab Banyumas dalam mendukung kebijakan PSN dilakukan oleh dua unit kerja dengan fungsi yang berbeda, yakni Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinkominfo Banyumas sebagai humas daerah dan Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Banyumas sebagai humas pimpinan, (2) GPR Pemkab Banyumas menghadapi kendala dalam fungsi manajerial karena kebijakan yang hendak didukung yang bersifat hierarkis atau *top-down*, sehingga (3) kecenderungan komunikasi yang dilakukan GPR Pemkab Banyumas selaras dengan karakteristik model *public informations* dan *two-way asymmetrical*.

Kata Kunci: *Praktik Kehumasan, Government Public Relations, Dinkominfo Banyumas, Prokompim Banyumas, Program Strategis Nasional*

ABSTRACT

Law Number 23 of 2014 on Regional Government mandates local governments to support national programs aimed at fulfilling governmental duties and meeting the needs of local communities, one of which is the National Strategic Program (PSN). In this regard, government public relations (GPR) plays a role in aligning cross-level policies to gain the support of the local community, given the central government's limitations in carrying out its administrative duties comprehensively. Nevertheless, the implementation of one of the National Strategic Program policies in Banyumas Regency has places the Banyumas Regency Government in a predicament regarding cross-level policy communication. This study aims to identify and analyze government public relations (GPR) practices in supporting PSN policies. This study also employs a qualitative approach using a case study research model. Data collection was conducted through in-depth semi-structured interviews, observation, and documentation involving five (5) key informants. The results of the study indicate that (1) the Banyumas Regency's GPR practices in supporting PSN policies are carried out by two units with distinct functions; the Sub-Coordinator for Public Information Management and Services at Department of Communication and Information Banyumas Regency (Dinkominfo Banyumas) as the instutional PR and the Sub-Division of Protocol and Governance Communication Banyumas Regency (Prokompom Banyumas) as regional head PR, (2) the Banyumas Regency's GPR faces challenges in its managerial functions due to the hierarchical or top-down nature of the policies, and (3) the communication practices conducted by the Banyumas Regency's GPR align with the characteristics of the public informations model and the two-way asymmetrical model.

Keywords: *Public Relations Practice, Government Public Relations, Dinkominfo Banyumas, Prokompim Banyumas, National Strategic Program*